



# RENJA TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Kami berharap dokumen Renja Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pembangunan tahunan, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, kealpaan, maupun kelemahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dokumen Renja ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya guna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Praya, 25 November 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Tengah



**Drs.H. Muhamad**

NIP.196607061993031015

## Daftar Isi

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	13
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika .....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	45
BAB III.....	51
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	51
BAB IV .....	54
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH .....	54
BAB V .....	63
PENUTUP.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah**, selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab secara teknis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, berkewajiban untuk menyusun **Rencana Kerja (Renja) SKPD** sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan strategis tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi aktif masyarakat. Dokumen ini memiliki kedudukan penting sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada tingkat organisasi pemerintahan yang paling operasional dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai dokumen resmi perencanaan tahunan, **Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026** disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan selaras dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja SKPD diawali dengan tahapan persiapan yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang relevan. Tahapan ini dilanjutkan dengan analisis terhadap gambaran umum pelayanan SKPD, guna mengidentifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan penelaahan terhadap dokumen Renstra SKPD serta rancangan awal RKPD, dirumuskan tujuan dan sasaran yang lebih terarah.

Selanjutnya, Renja SKPD memuat perumusan program dan kegiatan prioritas yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan internal organisasi, tetapi juga berdasarkan penelaahan terhadap aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

### **Prinsip-Prinsip Penyusunan Renja SKPD**

Dalam penyusunan **Rencana Kerja (Renja) SKPD**, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi acuan agar dokumen yang dihasilkan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD** sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah;
2. **Rumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD disusun berdasarkan pertimbangan urutan urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun pilihan, yang membutuhkan prioritas penanganan;
3. **Mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD** sebagai batas alokasi anggaran yang rasional dan efisien;
4. **Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah**, bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan tersusun secara simultan dan terintegrasi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian dari siklus penyusunan APBD;
5. **Program dan kegiatan yang dirumuskan harus memuat tolok ukur kinerja, target capaian, keluaran (output), biaya satuan per keluaran, serta total kebutuhan dana**, baik untuk tahun perencanaan (tahun  $n$ ) maupun proyeksi tahun berikutnya (tahun  $n+1$ ).

### **Keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**

Renja SKPD memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah, seperti **RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD**. Renja SKPD merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan dan sasaran strategis yang

tertuang dalam Renstra SKPD dan RPJMD, serta menjadi masukan utama bagi penyusunan RKPD tahun berjalan.

Lebih lanjut, Renja SKPD berperan penting dalam penyusunan dokumen penganggaran, seperti **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)**, **Kebijakan Umum Anggaran (KUA)**, **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**, serta **Rancangan APBD (RAPBD)**. Dengan demikian, keberadaan dan kualitas Renja SKPD menjadi fondasi penting dalam menjamin keselarasan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. **Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958** tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
10. **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan resmi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun anggaran 2026. Dokumen ini menjadi dasar operasional dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

2. Tujuan Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arah dan gambaran perencanaan tahunan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengelolaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Renja ini disusun secara komprehensif, integral, dan strategis guna memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun perencanaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan uraian singkat mengenai pengertian dan ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, menjelaskan proses penyusunannya, serta menguraikan keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Renja Kementerian/Lembaga (K/L), dan Renja Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai tindak lanjut hasil penyusunan Renja dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab ini menyajikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun sebelumnya, serta capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Pokok-pokok materi yang disampaikan dalam subbab ini meliputi:

1. Realisasi program dan kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran** sebagaimana direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang **telah mencapai target kinerja hasil/keluaran** sesuai dengan perencanaan;
3. Realisasi program dan kegiatan yang **melebihi target kinerja hasil/keluaran** dari yang telah ditetapkan;
4. **Analisis faktor-faktor penyebab** dari tidak tercapainya, tercapainya, maupun melebihinya target kinerja program dan kegiatan;
5. **Implikasi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah**, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. **Kebijakan dan langkah-langkah perencanaan maupun penganggaran** yang perlu ditempuh sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008** tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan ke depan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Subbab ini mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta relevansinya terhadap pencapaian visi dan misi daerah maupun sasaran pembangunan nasional dan internasional. Pokok-pokok materi yang disajikan mencakup:

- a) **Tingkat kinerja pelayanan** Dinas Komunikasi dan Informatika serta berbagai **isu kritis** yang memengaruhi kualitas layanan;
- b) **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c) **Dampak permasalahan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah**, serta terhadap **program nasional dan/atau internasional**;
- d) **Tantangan dan peluang** yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e) **Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan strategis sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun perencanaan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisi tinjauan kritis terhadap **kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil analisis kebutuhan** pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Materi yang disampaikan mencakup:

1. **Proses perbandingan** antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pembangunan bidang komunikasi dan informatika;
2. **Alasan dan urgensi** dilaksanakannya proses review terhadap Rancangan Awal RKPD;
3. **Temuan-temuan penting dan catatan perbedaan**, baik berupa ketidaksesuaian program dan kegiatan, maupun kesesuaian substansi tetapi dengan besaran atau alokasi yang berbeda;
4. Penyajian hasil review tersebut dalam **Lampiran Tabel 2.3** yang memuat perbandingan program/kegiatan usulan Dinas Kominfo dengan muatan dalam Rancangan Awal RKPD

Awal RKPD tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Subbab ini menyajikan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi profesi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang menyampaikan usulan secara langsung kepada perangkat daerah provinsi. Kajian ini juga mencakup informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data lapangan, penelitian, serta pengamatan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota, apabila telah dilaksanakan.

Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini mencakup:

- a) **Penjelasan mengenai proses perolehan usulan program/kegiatan** dari pemangku kepentingan, termasuk mekanisme pengumpulan data dan koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah;
- b) **Analisis kesesuaian usulan-usulan tersebut dengan isu-isu strategis dan kebutuhan aktual**, serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c) Penyajian **Tabel 2.4** yang memuat daftar usulan program/kegiatan masyarakat berikut hasil penelaahan dan rekomendasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator or Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini memuat hasil penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang relevan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan yang dirumuskan oleh perangkat daerah selaras dengan

kebijakan nasional dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara terpadu.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tujuan** adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Adapun kriteria perumusan tujuan antara lain:

- a) Disusun dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- b) Dapat diukur pencapaiannya dalam jangka waktu lima tahun;
- c) Dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang jelas, terukur, dan mudah dipahami.

**Sasaran** adalah rumusan kondisi spesifik yang menggambarkan pencapaian tujuan, berupa hasil pembangunan (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjelaskan dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- b) Satu tujuan dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran;
- c) Memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- d) Memenuhi prinsip-prinsip perumusan SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve);
- e) Memuat indikator kinerja sasaran yang akan digunakan sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah.

**Langkah-langkah dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah**, antara lain:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Apabila rumusan tujuan belum sepenuhnya menjawab isu-isu strategis tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
2. Merumuskan pernyataan sasaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan indikator tujuan dan sasaran secara terukur dan dapat dipantau pencapaiannya.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah. Rumusan tujuan

dan sasaran tahun rencana juga dapat disesuaikan kembali dengan mengacu pada indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra serta memperhatikan dinamika permasalahan aktual yang dihadapi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun rencana ditampilkan dalam **Tabel 3.2** berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6

### 3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini memuat informasi mengenai rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam subbab ini antara lain:

- a) **Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan** dalam perumusan program dan kegiatan, seperti hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu-isu strategis, arah kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari pemangku kepentingan;
- b) **Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan** yang direncanakan, termasuk sasaran, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, dan estimasi kebutuhan anggaran.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini menyajikan rencana kerja dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun perencanaan. Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam perumusan program dan kegiatan dalam kaitannya dengan pendanaan, antara lain:

- a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan**, seperti urgensi program, ketersediaan sumber daya,

keterkaitan dengan kebijakan strategis, serta hasil kajian kebutuhan riil di lapangan;

- b) **Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**, yang mencakup nama program, kegiatan, subkegiatan, pagu anggaran, serta outcome yang diharapkan;
- c) **Penjelasan apabila terdapat ketidaksesuaian antara rumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD dengan Rancangan Awal RKPD**, baik dalam hal jenis program/kegiatan, besaran pagu indikatif, maupun keduanya, disertai dengan alasan perbedaannya;
- d) Penyajian **Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil penyusunan Tabel 4.1**, yang memuat informasi lengkap mengenai nama program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan anggaran.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup yang mencakup hal-hal penting sebagai pengingat dan penguatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini meliputi:

- a) **Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**, baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai antisipasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil yang telah direncanakan;
- b) **Kaidah-kaidah pelaksanaan** yang menjadi acuan dalam implementasi program dan kegiatan, termasuk prinsip-prinsip tata kelola, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Renja;
- c) **Rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan dan target yang telah ditetapkan.

Pada bagian akhir dokumen, dicantumkan **tempat dan tanggal penetapan dokumen, nama perangkat daerah, nama lengkap dan tanda tangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta cap/stempel resmi perangkat daerah** yang bersangkutan sebagai bentuk pengesahan dokumen.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, capaian target kinerja, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya.

##### 2.1.1 Capaian Anggaran Tahun 2025

Total pagu anggaran belanja daerah yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA-APBD), adalah sebesar **Rp 8.291.691.788,88,-**, terdiri dari:

- **Belanja Langsung** sebesar **Rp 997.475.052,-**, dengan realisasi sebesar **Rp 965.390.000,-** atau **96,78%**;
- **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp 7.294.216.736,88,-**, dengan realisasi sebesar **Rp 6.917.765.075,-** atau **94,83%**.

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, sebagaimana tercatat dalam Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (DPPA-APBDP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2025. Realisasi keuangan mencapai **Rp 8.048.466.286,-** atau sebesar **97,07%**, dengan capaian **realisasi fisik sebesar 100%**.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan **5 (lima) program**, yang terdiri dari **10 (sepuluh) kegiatan** dan **26 (dua puluh enam ) subkegiatan**, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun **siswa anggaran sebesar Rp 243.225.502,88,-** merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran yang dikembalikan ke Kas Daerah. Alokasi anggaran tahun 2025 telah difokuskan untuk

mendukung secara langsung **sasaran strategis dan indikator kinerja utama** sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kinerja (PK)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun) 2025	Perkiraan Capaian Renstra Target Perangkat s/d tahun berjalan	Realisasi Target Capaian Renstra Daerah
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Relaisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	BB	BB	B	B			BB	

1		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	3
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	2
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	4
7	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3
8	Forum Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	16 Laporan	3

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100 %
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>									

		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	
<b>4</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Set Meja Rapat dan Work Station, 2 Lemari Arsip	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Set Meja Rapat dan Work Station, 2 Lemari Arsip	Unit		
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN</b>	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)									

		<b>KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas</b>								
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	52 Media	52 Media	0	0	0	52 Media	52 Media		
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-Jumlah PPID Aparat Desa yang Terlatih -Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih	113 Desa 45 Orang	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%	
3	Diseminasi Informasi	-Media Luar Ruangan  -Media Dalam Ruangan	-67 Media Luar Ruangan ( Baliho/ Spanduk ) -Media Dalam					-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk) -Media Dalam Ruangan ( Podcast)	-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk) -Media Dalam Ruangan ( Podcast)	-67 Media Luar Ruangan ( Baliho/ Spanduk ) -Media Dalam	

				Ruangan ( Podcast)							Ruangan ( Podcast)
<b>III</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line</b>								
		<b>Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
	1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith yang tersedia ( Mbps)	380 Mbps ( Dedicat ed)	320 Mbps ( Dedicat ed )	340 Mbps ( Dedicat ed)	600 Mbps ( Dedicat ed )		650 Mbps ( Dedicat ed )	650 Mbps ( Dedicat ed )	
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aolikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	2 Aplika si	2 Aplika si	2 Aplika si	100%	2 Aplika si	2 Aplika si	100%
	3	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	

	4	Koordinasi penyusunan dan/atau Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan	3 Dokumen	0	0	0		0	0	
I V		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Terselenggaranya pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	58 Data							
		<b>Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyusunan Buku Saku Statistik, Buku Lombok Tengah Dalam Data, Buku Kecamatan Dalam Data ( Buku Statistik dan Spasial Kecamatan )</b>	58 Data							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	58 Data	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	100%	58 Data	-58 Buku -24 Buku -12 Desa	100%
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan	Tersedianya pengelola Data sektoral yang terlatih		0	0	0				

	Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>-Persentase Informasi Daerah yang diamankan(%) -Jumlah pengamanan persandian (OPD ) -jumlah Pengelola sandi yang terlatih</b>								
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah</b>	-100% -32 OPD - 2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	-100% -32 OPD - 2 orang	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )	-100% -32 OPD - 2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	-100% -32 OPD - 2 orang	100%

## **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan dan Capaian Kinerja**

### **a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Beberapa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang realisasi kinerjanya belum mencapai target disebabkan oleh berbagai kendala teknis maupun administratif. Berikut daftar program/kegiatan yang tidak mencapai target hasil/keluaran secara maksimal:

#### **1. Administrai Umum Perangkat Daerah**

##### **➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Tidak maksimal karena ada himbuan tidak diperbolehkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah

#### **2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Karena ada penyesuaian harga

#### **4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, tenaga informasi & teknologi serta iuran jaminan/asuransi ada sisa dikarenakan telah Lulus PPPK, dan langganan surat kabar

#### **5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

##### **➤ Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Tidak dilakukannya realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya sisa anggaran pada akhir pelaksanaan kegiatan.

##### **➤ Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**

Tidak dilakukannya realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya sisa anggaran pada akhir pelaksanaan kegiatan.

## **6. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### **➤ Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah**

Terjadi akibat penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar pada saat pelaksanaan kegiatan

### **➤ Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE**

Realisasi kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai anggaran pada DPA karena dilakukan penyesuaian harga berdasarkan harga riil di lapangan, sehingga nilai realisasi lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan

### **➤ Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah**

Selisih antara pagu anggaran dalam DPA dan nilai realisasi terjadi akibat penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar pada saat pelaksanaan kegiatan

### **➤ Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**

Karena adanya efisiensi belanja melalui penyesuaian harga sesuai harga riil

## **7. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

### **➤ Penyelenggaraan Statistik Sektorial Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia**

Karna Tidak ada honorarium untuk BPS selaku Tim Penyusunan Buku Lombok Tengah Dalam Data dan Buku Spasial Kecamatan Sehingga Data Yang Tersusun Dalam Buku Tersebut

## **8. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### **➤ Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu realisasi anggaran serta ketersediaan barang yang tidak ready stock, maka pengadaan RAM Server dimaksud

tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara tertib administrasi. Oleh karena itu, anggaran belanja sebesar Rp9.000.000,- tidak direalisasikan dan dikembalikan ke kas daerah.

Demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bahan klarifikasi dan bukti dukung pemeriksaan BPK, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, antara lain:

- ❖ Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah

**c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan**

Secara umum, keterlambatan dalam pengajuan amprah (pencairan dana) yang tidak dapat diproses oleh perbendaharaan, terutama pada bulan Desember (akhir tahun), menjadi penyebab utama tidak tercapainya target pada beberapa subkegiatan.

**d) Implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Keterlambatan atau tidak terealisasinya beberapa subkegiatan berdampak pada terhambatnya pencapaian target strategis jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah berikut direkomendasikan:

- 1) **Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait**, khususnya bagian keuangan dan perbendaharaan, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih sinergis dan tepat waktu;
- 2) **Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan ketepatan jadwal, efisiensi anggaran, dan tercapainya target kinerja.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Subbab ini memuat analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **indikator kinerja utama (IKU)** yang telah ditetapkan dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, serta selaras dengan arah kebijakan dalam **RPJMD Kabupaten Lombok Tengah**.

Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan strategi dan kebijakan pada tahun perencanaan berikutnya.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Tengah

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Index PEMDI</b>			1	1,10	1,30	1,50	1,70	1,37	1,10	1,37	1,10	<p>1. realisasi tahun 2025 adalah hasil konversi dari nilai SPBE. Karena tahun 2025 tidak ada penilaian PEMDI, kabupaten Lombok tengah hanya masuk dalam pemantauan</p> <p>2. Mengembangkan infrastruktur TIK, membangun infrastruktur jaringan intra pemerintah yang</p>



													dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	<b>IMDI</b>			46,32	46,67	47,02	47,36	47,71	46,32	46,67	46,32	46,67	<p>1. Perluas Akses Internet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang WiFi gratis di desa, sekolah, dan ruang publik.</li> <li>• Dorong provider untuk perluas jaringan ke desa yang belum terjangkau.</li> </ul> <p>2. Tingkatkan Literasi Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakan pelatihan dasar digital untuk pelajar,</li> </ul>



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan hasil analisis kinerja yang diperoleh melalui review terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, sebagaimana lazimnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, tetap terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi serta peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada OPD;
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan e-Government sebagai penunjang pelayanan publik serta dalam mendukung pencapaian Indeks SPBE sesuai standar nasional;
3. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi persandian dan penyediaan data statistik yang mendukung pembangunan daerah;
4. Terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kurangnya tenaga teknis profesional di bidang teknologi informasi (IT).

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang direncanakan, serta berpotensi menghambat pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa isu penting yang muncul berdasarkan kondisi di atas, antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika;
- Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

#### **Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informatika:**

##### **Tantangan:**

- Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait;
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Belum optimalnya penerapan regulasi secara tegas di bidang komunikasi dan informatika;

- Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor komunikasi dan informasi;
- Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Peluang:**

- Tersedianya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas Diskominfo;
- Adanya program pembangunan infrastruktur berskala besar dan pengembangan e-Government, komunikasi, informasi, dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi.

Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan teknologi, tuntutan peningkatan kualitas birokrasi, serta meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang lebih baik, menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Beberapa tantangan dan peluang strategis yang perlu dicermati, antara lain:

- a) Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan publik secara daring (online), yang menuntut peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem layanan;
- b) Akses informasi yang semakin mudah melalui media sosial menuntut penyajian informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan mengharuskan terbangunnya sistem informasi/data yang terintegrasi antar-perangkat daerah.

**Formulasi Isu-Isu Strategis:**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan, serta peluang di atas, maka isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Membangun dan mengembangkan sistem **Satu Data Informasi Daerah** yang terintegrasi;
3. Meningkatkan keamanan informasi, perlindungan data, serta keamanan aplikasi internal pemerintahan;

4. Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi publik.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah akan berjalan secara optimal apabila disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang baik, sebagai instrumen untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar terlaksana secara efektif, efisien, terarah, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan meliputi: **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.**

Berdasarkan hasil review terhadap **Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026**, diketahui bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah tercantum secara konsisten dalam dokumen RKPD, baik dari segi jumlah, jenis program/kegiatan, maupun indikator kinerja yang digunakan.

Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 telah disusun berdasarkan **Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Tahun 2025–2029**, dengan tetap memperhatikan **program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.**

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	73	Rp 4.566.412.827,43		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	73	Rp 4.566.412.827,43	

		<b>DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>								
1		<b>Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 71.764.220</b>		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 71.764.220</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 6.007.200		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 6.007.200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 4.500.000		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 4.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 3.125.100		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 3.125.100	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 4.400.100		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 4.400.100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 2.158.500		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokum en	Rp 2.158.500	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lapora n	Rp 17.343.520		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lapora n	Rp 17.343.520	

		Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			
7		Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	Rp 21.554.800		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	Rp 21.554.800	
8		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp 900.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp 900.000	
9		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokuemn Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1 Berita Acara	Rp 11.775.000		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1 Berita Acara	Rp 11.775.000	
2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Tertib administrasi, akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 3.758.508.391,43</b>		<b>Meningkatnya Tertib administrasi, akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 3.758.508.391,43</b>	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Bulan	Rp 3.750.883.291.43		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Bulan	Rp 3.750.883.291.43	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	Rp 4.625.100		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	Rp 4.625.100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	Rp 3.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	Rp 3.000.000	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik</b>		<b>Rp 523.192.756</b>		<b>Meningkatnya administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik</b>		<b>Rp 523.192.756</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	Rp 366.140.756		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	Rp 366.140.756	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	Rp 157.052.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	Rp 157.052.000	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang memadai, tepat guna, dan mendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 11.416.240</b>		<b>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang memadai, tepat guna, dan mendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 11.416.240</b>	

	1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12 Kursi, 2 Lemari Arsip	Rp 11.416.240		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12 Kursi, 2 Lemari Arsip	Rp 11.416.240	
	5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya jasa penunjang umum yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah</b>		<b>Rp 105.281.220</b>		<b>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya jasa penunjang umum yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah</b>		<b>Rp 105.203.220</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	Rp 105.281.220		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	Rp 105.203.220	
	6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kondisi baik, layak pakai dan siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah</b>		<b>Rp 79.730.820</b>		<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kondisi baik, layak pakai dan siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah</b>		<b>Rp 79.730.820</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	Rp 79.730.820		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	Rp 79.730.820	

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)</b>		<b>Rp 1.670.740.660</b>		<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)</b>		<b>Rp 1.670.740.660</b>	
<b>1</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)</b>		<b>Rp 1.670.740.660</b>		<b>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)</b>		<b>Rp 1.670.740.660</b>	
1	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	60 Laporan (media)	Rp 1.425.794.100		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	60 Laporan (media)	Rp 1.425.794.100		
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	15 Komunitas	Rp 25.500.000		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	15 Komunitas	Rp 25.500.000		
3	Diseminasi Informasi		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	Persentase	Rp 70.002.177		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100% Persentase	Rp 70.002.177		
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media	55 Media	Rp 15.924.983		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media	55 Media	Rp 15.924.983		

				berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)				berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)		
5	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	120 Konten	Rp 39.375.000		Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	120 Konten	Rp 39.375.000	
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	138 Orang	Rp 94.124.400		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	138 Orang	Rp 94.124.400	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)</b>	<b>64,44 % ( Persen )</b>	<b>Rp 1.727.468.804</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)</b>	<b>64,44 % ( Persen )</b>	<b>Rp 1.727.468.804</b>	
1	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya pengelolaan e-government yang lebih optimal di Lingkup Pemerintah Daerah</b>		<b>Rp 1.727.468.804</b>		<b>Meningkatnya pengelolaan e-government yang lebih optimal di Lingkup Pemerintah Daerah</b>		<b>Rp 1.727.468.804</b>	
1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	5 Dokumen	Rp 271.421.976		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	5 Dokumen	Rp 271.421.976	
2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	8 Perangkat Daerah	Rp 1.294.214.840		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	8 Perangkat Daerah	Rp 1.294.214.840	
3	Koordinasi pembangunan		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	3 Aplikasi	Rp 50.891.988		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	3	Rp 50.891.988	

		dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)				dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	Dokumen		
	4	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	8 Dokumen	Rp 110.940.000		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	8 Dokumen	Rp 110.940.000	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))</b>	<b>55,56%</b>	<b>Rp 102.152.560</b>		<b>Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))</b>	<b>55,56%</b>	<b>Rp 102.152.560</b>	
1		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.</b>		<b>Rp 102.152.560</b>		<b>Tersedianya data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.</b>		<b>Rp 102.152.560</b>	

1	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100
2	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0,80 % (persen)	Rp 76.112.360	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0,80 % (persen)	Rp 76.112.360
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	45 Orang	Rp 9.600.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	45 Orang	Rp 9.600.000
4	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</b>	<b>35,29 (%)</b>	<b>Rp 125.813.696</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</b>	<b>35,29 (%)</b>	<b>Rp 125.813.696</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keamanan siber dan persandian dalam pemanfaatan</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>Rp 125.813.696</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keamanan siber dan persandian dalam pemanfaatan</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>Rp 125.813.696</b>

	<b>Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>sistem elektronik lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah</b>				<b>sistem elektronik lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah</b>			
1	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1 Laporan	Rp 19.576.400		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1 Laporan	Rp 19.576.400	
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2 Laporan	Rp 74.803.296		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2 Laporan	Rp 74.803.296	
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3 Perangkat Daerah	Rp 14.992.000		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3 Perangkat Daerah	Rp 14.992.000	
4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2 Dokumen	Rp 16.442.000		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2 Dokumen	Rp 16.442.000	

				yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)				yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)			
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan** dan **Forum Konsultasi Publik**, masyarakat telah menyampaikan berbagai **usulan program, kegiatan, dan subkegiatan** melalui aplikasi **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**.

Usulan-usulan tersebut kemudian dilakukan proses penelaahan dan penyelarasan dengan **isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**, agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Adapun daftar usulan program/kegiatan/subkegiatan yang telah diterima dan dianalisis ditampilkan pada **Tabel 2.5**, yang memuat informasi mengenai jenis usulan, sumber usulan, kesesuaian dengan tupoksi, serta hasil rekomendasi penelaahan.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Kabupaten Lombok Tengah

	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>73</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12 Laporan	
7	Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1 Laporan	
8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam	1 Berita Acara	

		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		
	9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
<b>2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Tertib administrasi, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</b>		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Bulan	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	
<b>3</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik</b>		
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	
<b>4</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang memadai, tepat guna, dan mendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	1	Pengadaan Mebel	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Kursi, 2 Lemari Arsip	
<b>5</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya jasa penunjang umum yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah</b>		

	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	
<b>6</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kondisi baik, layak pakai dan siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah</b>		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)</b>		
	1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)</b>		
	1	Relasi Media	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	60 Laporan (media)	
	2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	15 Komunitas	
	3	Diseminasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	Persentase	
	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	55 Media	
	5	Penyusunan Konten	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	120 Konten	

	6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	138 Orang	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)</b>	<b>64,44 % ( Persen )</b>	
	1	<b>Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan e-government yang lebih optimal di Lingkup Pemerintah Daerah</b>	45 OPD	
	1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	5 Dokumen	
	2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	8 Perangkat Daerah	
	3	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	3 Aplikasi	
	4	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	8 Dokumen	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))</b>	<b>Persentase</b>	
	1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Tersedianya data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.</b>	<b>Indeks</b>	

	1	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0,80 % (persen)	
	2	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0,80 % (persen)	
	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	45 Orang	
	4	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0,80 % (persen)	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</b>	<b>35,29 (%)</b>	
	1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keamanan siber dan persandian dalam pemanfaatan sistem elektronik lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah</b>	<b>2 Aplikasi</b>	
	1	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1 Laporan	
	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2 Laporan	
	3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3 Perangkat Daerah	
	4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2 Dokumen	

## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada akselerasi transformasi digital serta penyediaan konektivitas yang andal, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Renstra ini diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas layanan digital pemerintahan. Beberapa poin utama dari kebijakan tersebut adalah:

#### 1. Fokus pada Transformasi Digital:

Komdigi berkomitmen memperkuat fondasi transformasi digital dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang merata dan andal di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

#### 2. Percepatan Pengembangan Ekosistem Digital:

Renstra mendukung terbentuknya ekosistem digital nasional yang mencakup penguatan teknologi, ruang digital, dan layanan digital yang berdaya saing tinggi.

#### 3. Penyediaan Konektivitas yang Andal dan Terjangkau:

Pemerintah pusat mendorong perluasan konektivitas digital hingga ke wilayah pedesaan, sebagai dasar pembangunan inklusif berbasis teknologi.

#### 4. Dukungan terhadap Industri Penyiaran:

Komdigi menyiapkan strategi regulasi dan pengembangan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan industri penyiaran nasional, termasuk penguatan konten lokal dan platform digital.

#### 5. Regulasi Teknis Penunjang SPBE:

Komdigi telah menerbitkan regulasi seperti **Peraturan Menteri Komdigi Nomor 6 Tahun 2025** tentang **Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan serta Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**.

#### 6. Roadmap SDM Komunikasi dan Informatika:

Bersama LPEM UI, BPSDM Kominfo menyusun roadmap pengembangan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung arah Renstra 2025–2029.

**7. Kontribusi terhadap RPJMN 2025–2029:**

Transformasi digital menjadi bagian dari strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam RPJMN 2025–2029, dengan Komdigi sebagai aktor kunci dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan, komunikasi publik, dan keterbukaan informasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sebagai turunan dari arah kebijakan nasional dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah:

**Visi Kabupaten Lombok Tengah:**

*“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH)”*

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital”.**

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi pembangunan daerah melalui Dinas Kominfo mencakup:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital
2. Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan Dapat Diandalkan
3. Meningkatnya Keamanan Informasi
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Untuk lebih jelas tujuan dan sasaran beserta indikator serta target jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital		Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	2,63	2,79	2,95	3,11	3,27	3,43	
Transformasi Digital		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,00	90,5	91,00	91,5	92,00	92,5	
			Persentase layanan pemerintahan yang terdigitalisasi	45,75	49,8	53,85	57,89	61,94	65,99	
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	46,32	46,67	47,02	47,36	47,71	48,06	
		Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,80	3,00	3,00	3,20	3,20	3,50	
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	13,62	16,34	19,06	21,79	24,51	27,23	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	76,77	80,01	81,3	82,6	83,89	85,18	

## BAB IV

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan ketentuan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024** tentang **Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.

Untuk periode Tahun 2026 hingga 2027, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan **1 (satu) Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dan **4 (empat) Program Strategis**, yang terdiri atas:

- **5 (Lima) Program**
- **10 (Sepuluh) Kegiatan**
- **35 (Tiga Puluh Lima ) Subkegiatan,**

yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju  
Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah**

Kode Rekening		Urusan /bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting		Prakiraan Maju Tahun 2027	Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan dana/pagu indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)</b>		<b>73</b>	<b>Rp 71.764.220</b>	<b>DAU</b>		<b>73</b>	<b>Rp 82.300.735</b>	
	1		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 71.764.220</b>	<b>DAU</b>			<b>Rp 82.300.735</b>	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		1 Dokumen	Rp 6.007.200	DAU		1 Dokumen	Rp 9.130.803	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -SKPD		1 Dokumen	Rp 4.500.000	DAU		1 Dokumen	Rp 4.950.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 3.125.100	DAU		1 Dokumen	Rp 3.437.610	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 4.400.100	DAU		1 Dokumen	Rp 4.840.110	

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 2.158.500	DAU		1 Dokumen	Rp 2.374.350	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		12 Laporan	Rp 17.183.120	DAU		12 Laporan	Rp 18.901.432	
		7	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	Rp 21.554.800	DAU		1 Laporan	Rp 25.878.930	
		8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	Rp 900.000	DAU		1 Dokumen	Rp 990.000	
		9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1 Berita Acara	Rp 11.775.000	DAU		1 Berita Acara	Rp 12.952.500	
	<b>2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Tertib administrasi, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 3.758.508.391,43</b>				<b>Rp 4.134.359.142</b>	
		1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		12 Bulan	Rp 3.750.883.241	DAU		12 Bulan	Rp 4.125.971.532	

		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1 Laporan	Rp 4.625.100	DAU		1 Laporan	Rp 5.087.610	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12 Laporan	Rp 3.000.000	DAU		12 Laporan	Rp 3.300.000	
	<b>3</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik</b>			<b>Rp 523.192.756</b>	<b>DAU</b>			<b>Rp 575.512.031</b>	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12 Paket	Rp 366.140.756	DAU		12 Paket	Rp 402.754.831	
		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12 Laporan	Rp 157.052.000	DAU		12 Laporan	172.757.200	
	<b>4</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang memadai, tepat guna, dan mendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Rp 11.416.240</b>	<b>DAU</b>			<b>Rp 12.557.864</b>	
		1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		12 Kursi, 2 Lemari Arsip	Rp 11.416.240	<b>DAU</b>		12 Kursi, 2 Lemari Arsip	Rp 12.557.864	

	5		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya jasa penunjang umum yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah</b>			<b>Rp 105.203.220</b>	DAU			<b>Rp 115.723.542</b>	
		1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	Rp 105.203.220	DAU		12 Bulan		Rp 115.723.542	
	6		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kondisi baik, layak pakai dan siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah</b>			<b>Rp 79.730.820</b>	DAU			<b>Rp 87.703.902</b>	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	Rp 79.730.820	DAU		5 Unit Motor dan 2 Unit Mobil		Rp 87.703.902	
2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)</b>			<b>Rp 1.670.740.660</b>	DAU			<b>Rp 1.837.814.726</b>	
	1		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)</b>			<b>Rp 1.670.740.660</b>	DAU			<b>Rp 1.837.814.726</b>	

		1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	65 Laporan (media)	Rp 1.425.794.100	DAU		65 Laporan (media)	Rp 1.568.373.510	
		2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	Rp 25.500.000	DAU		20 Komunitas	Rp 28.050.000	
		3	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	Persentase	Rp 70.002.177	DAU		5 Laporan	Rp 77.002.395	
		4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	55 Media	Rp 15.924.983	DAU		58 Media	Rp 17.517.481	
		5	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	120 Konten	Rp 39.375.000	DAU		120 Konten	Rp 43.312.500	
		6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	138 Orang	Rp 94.144.400	DAU		138 Orang	Rp 103.558.840	
<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)</b>	<b>64,44 % ( Persen )</b>		<b>DAU</b>		<b>68,89 % ( Persen )</b>		
	<b>1</b>		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan e-government yang lebih optimal di Lingkup Pemerintah Daerah</b>		<b>Rp 1.727.468.804</b>	<b>DAU</b>			<b>Rp 1.900.215.684</b>	

		<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)		5 Dokumen	Rp 271.421.976	DAU		5 Dokumen	Rp 298.564.173
	2	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		8 Perangkat Daerah	Rp 1.294.214.840	DAU		2 Perangkat Daerah	Rp 1.423.636.324
	3	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)		3 Aplikasi	Rp 50.891.988	DAU		3 Aplikasi	Rp 51.481.868
	4	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		8 Dokumen	Rp 110.940.000	DAU		8 Dokumen	Rp 122.034.000
<b>4</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))</b>		<b>55,56%</b>	<b>Rp 102.152.560</b>	<b>DAU</b>		<b>66,67%</b>	<b>Rp 112.367.816</b>
	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Tersedianya data dan informasi statistik sektoral</b>			<b>Rp 102.152.560</b>	DAU			<b>Rp 112.367.816</b>

		<b>di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.</b>								
		1 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100	DAU		0,85 % (persen)	Rp 9.042.110		
		2 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0,80 % (persen)	Rp 76.112.360	DAU		0,85 % (persen)	Rp 83.723.596		
		3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	45 Orang	Rp 9.600.000	DAU		45 Orang	Rp 10.560.000		
		4 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0,80 % (persen)	Rp 8.220.100	DAU		0,85 % (persen)	Rp 9.042.110		
<b>5</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</b>	<b>35,29 (%)</b>	<b>Rp 125.813.696</b>	<b>DAU</b>		<b>42,11 (%)</b>	<b>Rp 138.395.065</b>		
	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)</b>	<b>2 Aplikasi</b>	<b>Rp 125.813.696</b>	<b>DAU</b>		<b>2 Aplikasi</b>	<b>Rp 138.395.065</b>		
		1 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian	1 Laporan	Rp 19.576.400	DAU		1 Laporan	Rp 21.534.040		

		Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)								
	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2 Laporan	Rp 74.803.296	DAU		2 Laporan	Rp 82.283.625		
	3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3 Perangkat Daerah	Rp 14.992.000	DAU		3 Perangkat Daerah	Rp 16.491.200		
	4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2 Dokumen	Rp 16.442.000	DAU		2 Dokumen	Rp 18.086.200		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, disampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut sebagaimana berikut:

**a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian**

Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan **5 (Lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 35 (Tiga Puluh Lima) subkegiatan** yang tersebar di masing-masing bidang serta sekretariat. Penyebaran program dan kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain, baik dari segi penganggaran maupun substansi pelaksanaannya.

Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antar semua unsur pelaksana, baik di tingkat sekretariat, bidang, maupun seksi, menjadi kunci utama agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan **lancar, sinergis**, dan **mencapai target kinerja** sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja.

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan perlu didukung melalui upaya **sinergi dan kolaborasi lintas sektor**, khususnya dengan pihak-pihak yang memiliki program/kegiatan sejenis, baik di tingkat pusat (Kementerian Kominfo), provinsi (Diskominfo NTB), maupun internal kabupaten.

**b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja Tahun 2026**

Renja Tahun 2026 akan menjadi **pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan diarahkan, dikendalikan, dan dipantau secara langsung oleh **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**;
2. Kepala Dinas dibantu oleh **Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, serta para Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional** di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
3. Penyusunan dan pelaksanaan Renja ini berpedoman pada **Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029**, serta **RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026**.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Capaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada **peraturan perundang-undangan yang berlaku**, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Semua program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan **prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan efektif**.

Dinas Komunikasi dan Informatika akan memastikan **kesinambungan dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan**, melalui sinergi yang erat dengan:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan
- Perangkat daerah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan pembelanjaan anggaran dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Praya, 25 November 2025

Kepala Dinas Kominfo  
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUHAMAD  
NIP.196512311989031209